

**DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MERESPONS
KEBIJAKAN PERDAGANGAN *EUROPEAN UNION DEFORESTATION
REGULATION* (EUDR) PADA KOMODITAS KARET PERIODE 2022-2024**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis upaya diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia dalam merespons kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), khususnya terhadap komoditas karet selama periode 2022–2024. Regulasi EUDR merupakan bentuk hambatan non-tarif yang diberlakukan oleh Uni Eropa untuk membatasi akses pasar dan mengatur beberapa komoditas untuk memastikan bahwa tidak berkontribusi pada deforestasi hutan, termasuk salah satunya komoditas karet. Penelitian ini menggunakan teori yang diungkapkan oleh Rana (2007) dalam melihat bentuk-bentuk diplomasi ekonomi yang diupayakan oleh Indonesia yang memandang kehadiran regulasi EUDR di Uni Eropa sebagai tantangan perdagangan, terutama akan berdampak pada petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara bersama Kementerian Luar Negeri Indonesia (KEMLU) dan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), serta kajian literatur dari berbagai dokumen dalam mendapatkan data penelitian. Selanjutnya, dilakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan terhadap data penelitian yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi melalui pendekatan negosiasi dengan pihak Uni Eropa melalui pengiriman joint letter yang diinisiasi oleh Like-Minded-Countries (LCM) dan Joint Task Force (JTF) bersama Malaysia-Uni Eropa, mengirimkan perwakilan negara, terlibat secara aktif dalam forum internasional, seperti melalui pertemuan *Technical Barriers to Trade* (TBT) WTO maupun kerangka *Working Group on Sustainable Natural Rubber* (WGSNR). Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan negara-negara produsen karet alam di dunia untuk menyampaikan keprihatinan kolektif terhadap keberadaan EUDR melalui inisiasi *joint communique*. Upaya diplomasi ekonomi ini bertujuan untuk menyuarakan kekhawatiran EUDR yang berpotensi menghambat kepentingan ekspor nasional komoditas karet serta menjamin keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok karet yang berkelanjutan di pasar Uni Eropa.

Kata kunci: EUDR, Uni Eropa, Karet, Diplomasi Ekonomi.

INDONESIA’S ECONOMIC DIPLOMACY IN RESPONDING TO THE *EUROPEAN UNION DEFORESTATION REGULATION* (EUDR) TRADE POLICY ON THE RUBBER COMMODITY DURING 2022–2024 PERIOD

ABSTRACT

This research aims to analyze Indonesia's economic diplomacy efforts in responding to the *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), with particularity concerning the rubber commodity during the 2022–2024 period. EUDR regulation is a form of *Non-Tariff Barrier* (NTB) that implemented by the European Union to restrict market access and to ensure that specific commodities that don’t contribute to deforestation, including rubber commodity. This research adopts the of economic diplomacy that proposed by Rana (2007) to examine the various forms of diplomatic actions that initiated by Indonesia in addressing the EUDR, which is perceived as a trade barrier, particularly for smallholder farmers. This research employs a qualitative descriptive method by collecting data through interviews with the Indonesian Ministry of Foreign Affairs (MOFA) and the Indonesian Rubber Association (GAPKINDO), as well as reviewing various literature and documents data sources. The data were then processed through reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings of this research indicate that Indonesia has implemented economic diplomacy through a negotiation approach with the European Union, such as submission of *joint letter* that initiated by *Like-Minded Countries* (LMC) and form *Joint Task Force* (JTF) with Malaysia-EU. Indonesia also deployed national representatives and actively engaged in international forums, such as the World Trade Organization's *Technical Barriers to Trade* (TBT) meetings and the framework of *Working Group on Sustainable Natural Rubber* (WGSNR) and fostered cooperation with other natural rubber-producing countries to express collective concerns regarding the EUDR through *joint communiqué*. These economic diplomacy efforts aim to voice concerns about the potential of the EUDR to hinder Indonesia’s national rubber export interests and to ensure the inclusion of smallholder farmers in sustainable rubber supply chains to the European Union market.

Keywords: EUDR, European Union, Rubber, Economic Diplomacy.